

KAMIS, 9 SEI

Implikasi Politis Mukerr

oleh: DR Eny Haryati MSi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara kelembagaan menyatakan netral dalam menghadapi pemilu presiden putaran kedua 20 September 2004 nanti. Selanjutnya PKB memberikan kebebasan kepada warganya untuk menentukan pilihan politiknya sesuai dengan nurani mereka masing-masing. Demikian salah satu butir dari empat butir ketetapan Nusyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III PKB yang dideklarasikan di Jakarta 1 September 2004.

Muzadi menyambut baik atas keputu san netral iu. Menurutnya: "Kalau secara institusi PKh mengambil posisi untuk tidak memilih salah satu capres, saya kira itu bagus; bagus bagi PKB, bagus pula untuk saya dan NU (Nahdatul Ulama)." Demikian pernyataan Hasyim usai berdialog dengan Forum Muda Islam Jawa Timur dan Eksponen Angkatan 1966 di Hotel Sahid Surabaya, Kamis, 2 September 2004.

Bila kita mencermati fenomena yang berkembang saat ini, implikasi politis atas ketetapan Mukernas PKB seidaknya sebagai berikut. Pertama, dengan ketetapan tersebut, para elite PKB menjadi tilak terbebani dan tidak terikat janji untuk mempersembahkan se-

jumlah suara tertentu kepada kandidat presiden. Sehingga terhadap kandidat yang kalah, PKB tidak memiliki beban moral atas kegagalannya. Sementara siapa pun yang kalah, reputasi PKB tidak akan runtuh seiring dengan runtuhnya popularitas sang kandidat yang mengalami kegagalan itu.

Kedua, kandidat presiden mana pun yang menang dalam pemilu, para elite PKB akan tetap memiliki peluang untuk eksis dalam kabinet mendatang, kendati eksistensi mereka belum tentu signifikan, lantaran PKB dianggap tidak melakukan "investasi" habishabisan. Elite PKB pada konteks ini sesungguhnya telah menentukan pilihan untuk menjadi safety player, artinya pemain politik yang mengambil langkah paling aman dan paling menguntungkan. Karena siapa pun yang tampil sebagai pemenang, ia tetap dapat menikmati kue kemenangan.

Ketiga, sikap netral yang dimbil PKB menempatkan posisi Abdurahman Wahid (Gus Dur) pada posisi sangat terhormat; dan pada saat yang sama tidak memperparah luka Hasyim Muzadi terhadap PKB kubu Gus Dur. Karena jika saja PKB secara kelembagaan berpihak pada SBY-Kalla, maka tentu saja pada tataran institusi, PKB telah menoreh luka baru atas Hasyim Muzadi. Ini sangat tidak menguntungkan PKB di masa mendatang jika pasangan Mega-Hasyim ternyata bisa tampil sebagai pemenang. Sedangkan untuk memberikan dukungan kepada Mega-Hasyim, tentu saja dalam kalkulasi politik PKB seiring konteks historis yang melatari, itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan.

Keempat, keputusan PKB untuk tidak berpihak pada salah satu kandidat memberikan kesan kepada publik bahwa parpol ini memberikan kemerdekaan penuh kepada warganya untuk menentukan pilihan politik. Ini relevan dipandang sebagai kedewasaan politik para

elitenya; lantaran keputusan tersebut sangat kondusif bagi upaya melakukan pendidikan politik di saat seluruh komponen bangsa sepakat melakukan proses demokratisasi (transisi demokrasi). Kesan demikian dapat mempercantik opini publik terhadap PKB beserta elitenya. Tentu saja hal ini dapat menjadi modal baik bagi PKB dalam upaya mengibarkan bendera politiknya di masa mendatang.

Kelima, ketetapan mukernas berpeluang dapat menetralisir konflik internal yang sedang terjadi di tubuh PKB, pada saat yang sama tidak memperparah konflik yang sudah ada. Melalui ketetapan Mukernas itu, segala bentuk perbedaan yang sedang terjadi di tubuh PKB mendapat tempat untuk teraktualisasi. Itu semua dapat menghindarkan warga PKB dari perasaan tertekan dan serba kebingungan, sebagaimana pernah terjadi dan dialami warga PKB pada pemilu presiden putaran pertama. Ketika ada dua matahari dalam satu organisasi (Hasyim Muzadi dan Shalahuddin Wahid) yang dua-duanya menjadi cawapres dalam kubu yang berseberangan, warga PKB kala itu seolah sedang berada pada suasana serba tertekan dan serba kebingungan secara politik.

Keenam, ketetapan Mukernas ini sekaligus juga dapat menghilangkan kebingungan warga PKB atas imbauan untuk menjadi golongan putih (golput) yang pernah dihembuskan oleh Gus Dur beberapa waktu lalu. Karena kemerdekaan untuk memilih yang diamanahkan oleh Mukernas memberi keleluasaan warga PKB untuk bersikap apa saja: (1) untuk memilih pasangan Mega-Hasyim, (2) untuk memilih pasangan SBY-Kalla, (3) maupun untuk tidak memilih keduanya alias golput. Apa pun yang dipilih, warga PKB tidak sedang dalam suasana diimbau, ditekan dan terlebih dipaksa.

Nampaknya keputusan PKB untuk netral

Implikasi Politis Mukernas PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara kelembagaan menyatakan netral dalam menghadapi pemilu presiden putaran kedua 20 September 2004 nanti. Selanjutnya PKB memberikan kebebasan kepada warganyauntuk menentukan pilihan politiknya sesuai dengan nurani masingmasing. Demikian salah satu butir dari empat butir ketetapan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III PKB yang di deklarasikan di Jakarta 1 September 2004.

Sementara cawapres Hasyim Muzadi menyambut baik atas keputusan netral itu. Menurutnya; Kalau secara Institusi PKB mengambil posisi untuk tidak memilih salah satu capres, saya kira bagus; bagus bagi PKB, bagus pula untuk saya dan NU (Nahdathul Ulama)." Demikian pernyataan Hasyim Muzadi usai berdialog dengan forum Muda Islam Jawa Timur dan Eksponen Angkatan 1966 di Hotel Sahid Surabaya. Kamis, 2 Septerber 2004.

Bila kita mencermati fenimena yang berkembang saat ini implikasi politis atas ketetapan Mukernas PKB setidaknya setidaknya sebagai berikut. Pertama, denan ketetapan tersebut, para elite PKB menjadi tidak terbebani dan tidak terikat janji untuk mempersembahkan sejumlah suara tertentu kepada kandidat presiden. Sehingga terhadap kandidat yang kalah, PKB tidak memiliki beban moral atas kegagalannya. Sementara siapapun yang kalah, reputasi PKB tidak akan runtuh seiring dengan runtuhnya popularitas sang kandidat yang mengalami kegagalan itu.

Kedua, kandidat presiden mana pun yang menang dalam pemilu, para elite PKB akan tetap memiliki peluang untuk tetap eksis dalam kabinet mendatang, kendati eksistensi, kendati eksistensi mereka belum tentu signifikan, lantaran PKB dianggap tidak tidak melakukan "investasi" habis-habisan. Elite PKB dalam konteks ini sesungguhnya telah menentukan pilihan untuk menjadi savety player, artinya pemain politik yang mengambil langkah yang paling aman dan paling menguntungkan. Karena siapapun yang tampil sebagai pemenang, ia tetap dapat menikmati kue kemenangan.

Ketiga, sikap netral yang diambil PKB menempatkan posisi Abdulrahman Wahid (Gus Dur) pada posisi sangat terhormat; dan pada saat yang sama tidak memperparah luka Hasyim Muzadi terhadap PKB kubu Gus Dur. Karena jika saja PKB ecara kelembagaan berpihak pada SBY-Kalla, tentu saja pada tataran institusi, PKB telah menorah luka baru atas Hasyim Muzadi. Ini sangat tidak menguntungkan PKB di masa mendatang jika pasangan Mega-Hasyim bisa tampil sebagai pemenang. Sedangkan untuk memberikan dukungan kepada Mega- Hasyim, tentu saja pada kalkulasi politik PKB seiring konteks historis yang melantari, ini sangat tidak mungkin dilakukan.

Keempat, keputusan PKB untuk tidak berpihak pada salah satu kandidat memberikan kesan kepada publik bahwa parpol ini memberikan kemerdekaan penuh bagi warganya untuk menentukan pilihan politik. Ini relevan dipandang sebagai kedewasaan politik para elitrenya; lantaran keputusan tersebut sangat kondusif bagi upaya melakukanpendidikan politik di saat seluruh kmponen bangsa sepakat melakukan proses demokratisasi(transisi demokrasi). Kesan demikian dapat mempercantik opini publik terhadap PKB beserta elitenya. Tentu saja hal ini dapat menjadi modal baik bagi PKB dalam upaya mengibarkan bendera politiknya di masa mendatang.

Kelima, ketetapan mukernas berpeluang dapat menetralisir konflik internal yang sedang terjadi di tubuh PKB, pada saat yang sama tidak memperparah konflik yang sudah ada. Melalui ketetapan Mukernas itu, segala bentuk perbedaan yang sedang terjadi di tubuh PKB mendapat tempat untuk teraktualisasi. Itu semua dapat menghidarkan warga PKB dari perasaan tertekan dan seba kebingungan, sebagaimana pernah terjadi dan dialami warwa PKB pada pemilu presiden putaran pertama. Ketika ada dua matahari dalam satu organisasi (Hasyim Muzadi dan Shalahudin Wahid) yang dua-duanya menjadi cawapres dalam kubu yang bersebrangan, warga PKB kala itu seolah sedang berada pada suasana serba tertekan dan serba kebingungan secara politik.

Keenam, ketetapan Mukernas ini sekaligus juga dapat menghilangkan kebingungan warga PKB atas imbauan untuk menjadi golongan putih (Golput) yang pernah dihembuskan oleh Gus Dur beberapa waktu lalu. Karena kemerdekaan untuk memilih diamahkan oleh Mukernas memberi keleluasaan warga PKB untuk bersikap apa saja: (1) Untuk memilih pasangan Mega-Hasyim, (2) untuk memilih pasangan SBY-Kalla, (3) maupun untuk tidak keduanya alias Golput. Apapun yag dipilih, warga PKB tidak sedang dalam suasana diimbau, di tekan, dan terlebih dipaksa.

Nampaknya keputusan PKB untuk netral sungguh merupakan formula ideal ditili dari banyak kepentingan, terutama kepentingan PKB di masa mendatang. Persoalannya, akankah para elite PKB konsisten dalam mengimplementasi ketetapan Mukernas, setidak-tidaknya sampai dengan hari H?

Pertanyaan ini menjadi sangat penting untuk di eksplisitkan, mengingat dalam panggung politik "drama balik kanan" bisa saja terjadi jika setting dan scenario politik memang memungkinkan untuk itu. Pada detik-detik menjelang hati H misalnya, bisa saja para elite PKB diam-diam mengeluarkan watwa kepada warganya untuk memilih kandidat tertentu. Bila demilian adanya, Preseden terburuk dalam sejarah PKB benar-benar terjadi. Pada titik inilah sesungguhnya kinerja elite PKB sedang diuji.

Satu hal penting yang penulis rekomendasikan mengakhiritulisan ini, semoga dalam keadaan apapun dan bagaimana pun, atas kepentingan bangsa dan Negara, para elite PKB tetap memegang komitmen untuk mengimplementasikan hasil Mukernas sesuai amanah. Sementara warga PKB hendaknya dapat menggunakan kemerdekaannya untuk memilih yang di amanatkan mukernas dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian semoga warga PKB, baik secara individu maupun kelembagaan, bersama-samadengan warga parpol lain. Mewakili andil atas keberlangsungan perta demokrasi yang aman dan tertib. Yakni dalam angka mengantarkan bangsa ini memiliki pemimpin sejati. Artinya, pemimpin yang mau dan mampu membawa seluruh rakyat negeri ini menuju luhur mukti ing tembe mburi.